

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 3 AYAT 2 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
(STUDI KASUS PADA KEDAI KOPI YANG MEMUTARKAN LAGU
DAN/ATAU MUSIK DI WILAYAH KOTA SINGARAJA)**

Oleh

**I Gusti Lanang Surya Putra, NIM 1914101124
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di kota Singaraja belum terlaksana karena terdapat beberapa faktor terpenting belum terealisasi dalam menerapkan peraturan tersebut. Oleh sebab itu dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Bagaimana Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pemilik Usaha Kedai Kopi Yang Memutar Lagu Dan/Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial Di Singaraja dan apakah faktor-faktor penghambat implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap pemilik usaha kedai kopi di Singaraja. Pentingnya dilakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dari belum terimplementasinya PP tersebut. Merujuk pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengelolaan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial khususnya di kota Singaraja belum terlaksana karena belum terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Provinsi Bali dan upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Bali untuk mengatasi faktor penghambat implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Singaraja, sebagai berikut:pertama, Meningkatkan aspek substansi hukum dengan mempertegas aturan terkait pendistribusian royalti ;kedua, Meningkatkan aspek struktur hukum dengan cara memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha kedai kopi ;dan ketiga, Meningkatkan aspek Budaya hukum dengan cara memberikan kesadaran akan membayar royalti. Oleh sebab itu, Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Bali secepatnya membentuk LMK di provinsi Bali serta Apabila LMK sudah terbentuk maka LMK diharapkan untuk memberi pencegahan dengan cara mengadakan sosialisasi tentang PP Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di kota Singaraja terhadap seluruh pelaku usaha kedai kopi.

Kata kunci : Implementasi, Faktor Penyebab, LMK

**THE IMPLEMENTATION OF PROVISIONS IN PASAL 3 AYAT 2 OF
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 OF 2021 CONCERNING
ROYALTY MANAGEMENT OF COPYRIGHTS OF SONGS AND/OR MUSIC
(CASE STUDY ON COFFE SHOPS PLAYING SONG AND/OR MUISC IN
THE CITY OF SINGARAJA)**

By

I Gusti Lanang Surya Putra, NIM 1914101124

Law Department

ABSTRACT

The implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the management of song and/or music copyright royalties in the city of Singaraja has not been implemented because there are several important factors that have not been realized in implementing this regulation. Therefore, this research raises the issue of How to Implement PP Number 56 of 2021 Against Coffee Shop Business Owners Who Play Songs and/or Music for Commercial Purposes in Singaraja and what are the inhibiting factors for the implementation of PP Number 56 of 2021 against coffee shop business owners in Singaraja. The importance of conducting this research is to find out the causal factors of the PP not yet being implemented. Referring to this research using empirical legal research with the nature of descriptive research. The location of this research was conducted in Singaraja City. Data collection techniques used were document studies, observations and interviews. The sampling technique used is Non Probability Sampling and the determination of the subject uses Purposive Sampling technique. Qualitative data management and analysis techniques. The results of the study show that the withdrawal of royalties for playing songs and/or music commercially, especially in the city of Singaraja has not been carried out because the Collective Management Institute (LMK) has not been formed in the Province of Bali and the efforts that have been made by the Regional Office of KEMENKUMHAM in Bali Province to overcome the inhibiting factors for the implementation of PP Number 56 of 2021 for coffee shop business owners who play songs and/or music for commercial purposes in Singaraja, as follows: first, increasing aspects of legal substance by strengthening rules regarding the distribution of royalties; second, increasing aspects of the legal structure by providing outreach to perpetrators coffee shop business; and third, increasing aspects of legal culture by providing awareness of paying royalties. Therefore, the Bali Province KEMENKUMHAM Regional Office will immediately form an LMK in the province of Bali and if the LMK has been formed, it is hoped that the LMK will provide prevention by holding socialization regarding PP Management of song and/or music copyright royalties in the city of Singaraja to all coffee shop business actors

.Key Terms: *Implementation, Causing Factors, LMK*